LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 133/PMK.03/2021
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI

CONTOH FORMAT SURAT DAN LAPORAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCETAKAN METERAI TEMPEL, PEMBUATAN DAN DISTRIBUSI METERAI ELEKTRONIK, ATAU DISTRIBUSI DAN PENJUALAN METERAI TEMPEL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
..... (1)

---

Nomor : ..... (2) .....20.... (3)
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permintaan Pencetakan Meterai Tempel/Pembuatan dan Distribusi Meterai Elektronik/Distribusi dan Penjualan Meterai Tempel*)

Yth. Direktur Utama..... (4)
..... (5)

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, dengan ini diminta kepada .....(6) untuk melaksanakan:

Nama Paket Pekerjaan : .....; (7)
Spesifikasi Teknis : sebagaimana terlampir;
Besaran Kompensasi : sebagaimana terlampir;
Rancangan Kontrak : sebagaimana terlampir;
Sumber Pendanaan : .....; (8)

Berkenaan dengan hal tersebut, Saudara diminta menyampaikan dokumen rencana .....(9) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pimpinan perusahaan yang mendapat kuasa atau pendelegasian yang sah pada:

tanggal : .....; (10)
waktu : .....; (11)
tempat : ..... (12)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENCETAKAN METERAI TEMPEL,
PEMBUATAN DAN DISTRIBUSI METERAI ELEKTRONIK,
ATAU DISTRIBUSI DAN PENJUALAN METERAI TEMPEL

Angka (1) : diisi dengan alamat unit organisasi.

Angka (2) : diisi dengan nomor surat.

Angka (3) : diisi dengan tanggal surat.

Angka (4) : diisi dengan:

- Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, untuk pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik; atau
- PT Pos Indonesia (Persero), untuk distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

Angka (5) : diisi dengan:

- alamat Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, untuk pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik; atau
- alamat PT Pos Indonesia (Persero), untuk distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

Angka (6) : diisi dengan:

- Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, untuk pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik; atau
- PT Pos Indonesia (Persero), untuk distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

Angka (7) : diisi dengan:

- Pencetakan Meterai Tempel;
- Pembuatan dan Distribusi Meterai Elektronik; atau
- Distribusi dan Penjualan Meterai Tempel.

Angka (8) : diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan Meterai Tempel, pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik, atau distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

Angka (9) : diisi dengan:

- pencetakan Meterai Tempel;
- pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik; atau
- distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

Angka (10) : diisi dengan tanggal penyampaian dokumen rencana pencetakan Meterai Tempel, pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik, atau distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

Angka (11) : diisi dengan waktu penyampaian dokumen rencana pencetakan Meterai Tempel, pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik, atau distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

Angka (12) : diisi dengan tempat penyampaian dokumen rencana pencetakan Meterai Tempel, pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik, atau distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

Angka (13) : diisi dengan nama dan tanda tangan PPK.

Keterangan *) : coret yang tidak sesuai.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

Nomor : ..... (1) ....., .....20....(2)
Lampiran : ..... (3)
Hal : Permohonan Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala KPP ..... (4)
..... (5)

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengenai pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Dalam Bentuk Lain yang ditetapkan oleh Menteri dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, dengan ini:

nama : .....; (6)
NPWP : .....; (7)
alamat : ....., (8)

mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Teraan/Meterai Komputerisasi/ Meterai Percetakan*).

Sebagai kelengkapan persyaratan permohonan izin, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut**):

- ☐ surat keterangan layak pakai dari distributor mesin teraan meterai digital;
- ☐ surat pernyataan kepemilikan mesin teraan meterai digital;
- ☐ surat pernyataan penggunaan Meterai Komputerisasi;
- ☐ bentuk Meterai Percetakan;
- ☐ fotokopi dokumen izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang telah dilegalisasi;
- ☐ fotokopi dokumen penetapan sebagai perusahaan pencetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan aslinya.

Demikian permohonan kami sampaikan.

Pemohon,

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

Angka (1) : diisi dengan nomor surat.

Angka (2) : diisi dengan tempat dan tanggal surat.

Angka (3) : diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat.

Angka (4) : diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Angka (5) : diisi dengan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Angka (6) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain.

Angka (7) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain.

Angka (8) : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain.

Angka (9) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak, serta stempel untuk Wajib Pajak badan.

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai.

**) beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai, dengan ketentuan:

- untuk permohonan izin pembuatan Meterai Teraan, lampiran berupa:
  a. surat keterangan layak pakai dari distributor mesin teraan Meterai digital; dan
  b. surat pernyataan kepemilikan mesin teraan Meterai digital;
- untuk permohonan izin pembuatan Meterai Komputerisasi, lampiran berupa surat pernyataan penggunaan Meterai Komputerisasi; dan
- untuk permohonan izin pembuatan Meterai Percetakan, lampiran berupa:
  a. bentuk Meterai Percetakan;
  b. fotokopi dokumen izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang telah dilegalisasi; dan
  c. fotokopi dokumen penetapan sebagai perusahaan pencetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan aslinya.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

SURAT PERNYATAAN
KEPEMILIKAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Alamat : ..... (3)

Bertindak selaku Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak*):
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Alamat : ..... (6)
Jenis Usaha : ..... (7)
Nomor Telepon : ..... (8)
Nomor Faksimile : ..... (9)
Alamat *e-mail* : ..... (10)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas:
1. mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain; dan
2. memiliki mesin teraan meterai digital dengan identitas:
   merek : ..... (11)
   tipe/model : ..... (12)
   nomor seri : ..... (13)
   tahun pembuatan : ..... (14)

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain.

....., .....20.... (15)
Pembuat Pernyataan,

METERAI

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Angka (2) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Angka (3) | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Angka (4) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (5) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (6) | : | diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (7) | : | diisi dengan jenis usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (8) | : | diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (9) | : | diisi dengan nomor faksimile Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (10) | : | diisi dengan alamat posel Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (11) | : | diisi dengan merek mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. |
| Angka (12) | : | diisi dengan tipe/model mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. |
| Angka (13) | : | diisi dengan nomor seri mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. |
| Angka (14) | : | diisi dengan tahun pembuatan mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. |
| Angka (15) | : | diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat. |
| Angka (16) | : | diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Keterangan *) | : | coret yang tidak sesuai. |

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN METERAI KOMPUTERISASI

SURAT PERNYATAAN
PENGGUNAAN METERAI KOMPUTERISASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Alamat : ..... (3)

Bertindak selaku Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak*):
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Alamat : ..... (6)
Jenis Usaha : ..... (7)
Nomor Telepon : ..... (8)
Nomor Faksimile : ..... (9)
Alamat *e-mail* : ..... (10)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Komputerisasi yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang atas dokumen berupa .....(11) dengan jumlah .....(12) dokumen dalam 1 (satu) bulan.

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain.

....., .....20.... (13)
Pembuat Pernyataan,

METERAI

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN METERAI KOMPUTERISASI

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Angka (2) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Angka (3) | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Angka (4) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (5) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (6) | : | diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (7) | : | diisi dengan jenis usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (8) | : | diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (9) | : | diisi dengan nomor faksimile Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (10) | : | diisi dengan alamat posel Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (11) | : | diisi dengan jenis dokumen yang Bea Meterainya akan dibayar dengan menggunakan Meterai Komputerisasi. |
| Angka (12) | : | diisi dengan perkiraan jumlah dokumen yang Bea Meterainya akan dibayar dengan menggunakan Meterai Komputerisasi dalam 1 (satu) bulan. |
| Angka (13) | : | diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat. |
| Angka (14) | : | diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan, |
| Keterangan *) | : | coret yang tidak sesuai. |

E. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

1. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI TERAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

---

SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI TERAAN
Nomor: ..... (2)
Tanggal: ..... (3)

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, dengan ini memberikan izin pembuatan Meterai Teraan kepada Wajib Pajak:

Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Alamat : ..... (6)

dengan identitas mesin teraan meterai digital sebagai berikut:

Merek : ..... (7)
Tipe/Model : ..... (8)
Nomor Seri : ..... (9)
Tahun Pembuatan : ..... (10)
Kode Akun Pajak*) : 411611
Kode Jenis Setoran*) : ..... (11)

Surat Izin Pembuatan Meterai Teraan ini mulai berlaku pada tanggal .....(12) sebagai dasar untuk melakukan pembubuhan Meterai Teraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP ..... (13)

..... (14)

*) *Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran ini harus dicantumkan dalam formulir SSP atau Kode Billing pada saat penyetoran Deposit*

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI TERAAN

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama dan alamat unit organisasi yang menerbitkan surat izin. |
| Angka (2) | : | diisi dengan nomor surat izin. |
| Angka (3) | : | diisi dengan tanggal surat izin. |
| Angka (4) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Teraan. |
| Angka (5) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Teraan. |
| Angka (6) | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Teraan. |
| Angka (7) | : | diisi dengan merek mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. |
| Angka (8) | : | diisi dengan tipe/model mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. |
| Angka (9) | : | diisi dengan nomor seri mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. |
| Angka (10) | : | diisi dengan tahun pembuatan mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. |
| Angka (11) | : | diisi dengan kode jenis setoran:<br>- 201 untuk Pembuat Meterai yang hanya memiliki 1 (satu) unit mesin teraan Meterai digital; atau<br>- 2xx sesuai dengan nomor urut dilakukannya pendaftaran mesin teraan Meterai digital, untuk Pembuat Meterai yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit mesin teraan Meterai digital. |
| Angka (12) | : | diisi dengan tanggal mulai berlakunya izin pembuatan Meterai Teraan. |
| Angka (13) | : | diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| Angka (14) | : | diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |

2. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

---

SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI
Nomor: ..... (2)
Tanggal: ..... (3)

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, dengan ini memberikan izin pembuatan Meterai Komputerisasi kepada Wajib Pajak:

Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Alamat : ..... (6)

Surat Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi ini mulai berlaku pada tanggal .....(7) sebagai dasar untuk melakukan pembubuhan Meterai Komputerisasi dalam pembayaran Bea Meterai yang terutang atas dokumen berupa .....(8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP ..... (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama dan alamat unit organisasi yang menerbitkan surat izin. |
| Angka (2) | : | diisi dengan nomor surat izin. |
| Angka (3) | : | diisi dengan tanggal surat izin. |
| Angka (4) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Komputerisasi. |
| Angka (5) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Komputerisasi. |
| Angka (6) | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Komputerisasi. |
| Angka (7) | : | diisi dengan tanggal mulai berlakunya izin pembuatan Meterai Komputerisasi. |
| Angka (8) | : | diisi dengan jenis dokumen yang Bea Meterainya akan dibayar dengan menggunakan Meterai Komputerisasi |
| Angka (9) | : | diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| Angka (10) | : | diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |

3. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

---

SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN
Nomor: ..... (2)
Tanggal: ..... (3)

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai dan memperhatikan Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Nomor .....(4) tanggal .....(5), dengan ini memberikan izin pembuatan Meterai Percetakan kepada Wajib Pajak:

Nama : ..... (6)
NPWP : ..... (7)
Alamat : ..... (8)

Surat Izin Pembuatan Meterai Percetakan ini mulai berlaku pada tanggal .....(9) sampai dengan tanggal .....(10) sebagai dasar untuk melakukan pembubuhan Meterai Percetakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP ..... (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama dan alamat unit organisasi yang menerbitkan surat izin. |
| Angka (2) | : | diisi dengan nomor surat izin, |
| Angka (3) | : | diisi dengan tanggal surat izin. |
| Angka (4) | : | diisi dengan nomor Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu tentang Izin Operasional di Bidang Pencetakan Dokumen Sekuriti. |
| Angka (5) | : | diisi dengan tanggal Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu tentang Izin Operasional di Bidang Pencetakan Dokumen Sekuriti. |
| Angka (6) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Percetakan. |
| Angka (7) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Percetakan. |
| Angka (8) | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Percetakan. |
| Angka (9) | : | diisi dengan tanggal mulai berlakunya izin pembuatan Meterai Percetakan. |
| Angka (10) | : | diisi dengan tanggal berakhirnya izin pembuatan Meterai Percetakan, sesuai dengan tanggal berakhirnya izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti yang tercantum dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu. |
| Angka (11) | : | diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| Angka (12) | : | diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |

F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

---

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Biasa
Hal : Penolakan Pemberian Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain

Yth. ..... (4)
NPWP ..... (5)
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(7) tanggal .....(8) hal Permohonan Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain, dengan ini disampaikan bahwa permohonan yang Saudara ajukan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, yaitu:

1. .....;
2. .....;
3. ..... (9).

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021.

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP ..... (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN
PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama dan alamat unit organisasi yang menerbitkan surat penolakan pemberian izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (2) | : | diisi dengan nomor surat penolakan. |
| Angka (3) | : | diisi dengan tanggal surat penolakan. |
| Angka (4) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (5) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (6) | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (7) | : | diisi dengan nomor surat permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (8) | : | diisi dengan tanggal surat permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (9) | : | diisi dengan rincian persyaratan yang tidak dipenuhi dalam permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (10) | : | diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| Angka (11) | : | diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |

G. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI

LAPORAN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI
BULAN ..... (1)
..... (2)
NPWP ..... (3)

| Tanggal | Saldo Awal Deposit | Deposit | | Deposit Tersedia | Pembuatan Meterai Komputerisasi | | Saldo Akhir Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NTPN | Nilai (Rp) | | Jumlah Dokumen | Bea Meterai (Rp) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

....., .....20.... (4)
Pembuat Meterai,

..... (5)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama bulan yang dilaporkan. |
| Angka (2) | : | diisi dengan nama Pembuat Meterai. |
| Angka (3) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pembuat Meterai. |
| Angka (4) | : | diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat. |
| Angka (5) | : | diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Pembuat Meterai atau wakil Pembuat Meterai, serta stempel untuk Pembuat Meterai yang merupakan Wajib Pajak badan. |

**Bagian Tabel**

| | | |
|---|---|---|
| Kolom (1) | : | diisi dengan tanggal dilakukannya Deposit dan/atau pembuatan Meterai Komputerisasi. |
| Kolom (2) | : | diisi dengan nilai saldo awal Deposit pada tanggal dilakukannya Deposit dan/atau pembuatan Meterai Komputerisasi. |
| Kolom (3) | : | diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang telah diperoleh atas Deposit. |
| Kolom (4) | : | diisi dengan nilai Deposit. |
| Kolom (5) | : | diisi dengan nilai Deposit yang tersedia, sebesar nilai saldo awal Deposit (kolom 2) ditambah nilai Deposit (kolom 4). |
| Kolom (6) | : | diisi dengan jumlah Dokumen yang dibubuhi Meterai Komputerisasi. |
| Kolom (7) | : | diisi dengan jumlah nilai nominal Meterai Komputerisasi yang dibubuhkan pada Dokumen, sebesar jumlah Dokumen (kolom 6) dikalikan dengan tarif Bea Meterai. |
| Kolom (8) | : | diisi dengan nilai saldo akhir Deposit pada tanggal dilakukannya Deposit dan/atau pembuatan Meterai Komputerisasi, sebesar nilai Deposit yang tersedia (kolom 5) dikurangi dengan jumlah nilai nominal Meterai Komputerisasi yang dibubuhkan pada Dokumen (kolom 7). |

H. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN

LAPORAN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN
BULAN ..... (1)
..... (2)
NPWP ..... (3)

| No. | Pemungut Bea Meterai | | Jenis Dokumen | Nomor Seri | | Jumlah Lembar | Tarif (Rp) | Jumlah Bea Meterai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NPWP | Nama | | Awal | Akhir | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

....., .....20.... (4)
Pembuat Meterai,

..... (5)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama bulan dilakukannya penyerahan cek dan/atau bilyet giro kepada Pemungut Bea Meterai. |
| Angka (2) | : | diisi dengan nama Pembuat Meterai. |
| Angka (3) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pembuat Meterai. |
| Angka (4) | : | diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat. |
| Angka (5) | : | diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Pembuat Meterai atau wakil Pembuat Meterai, serta stempel untuk Pembuat Meterai yang merupakan Wajib Pajak badan. |

**Bagian Tabel**

| | | |
|---|---|---|
| Kolom (1) | : | diisi dengan nomor urut. |
| Kolom (2) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemungut Bea Meterai yang meminta pembuatan Meterai Percetakan. |
| Kolom (3) | : | diisi dengan nama Pemungut Bea Meterai yang meminta pembuatan Meterai Percetakan. |
| Kolom (4) | : | diisi dengan:<br>- cek; atau<br>- bilyet giro. |
| Kolom (5) | : | diisi dengan nomor seri awal, dalam hal nomor seri cek atau bilyet giro berurutan. |
| Kolom (6) | : | diisi dengan nomor seri akhir, dalam hal nomor seri cek atau bilyet giro berurutan. |
| Kolom (7) | : | diisi dengan jumlah lembar cek atau bilyet giro. |
| Kolom (8) | : | diisi dengan tarif Bea Meterai yang tertera pada Meterai Percetakan. |
| Kolom (9) | : | diisi dengan jumlah nilai nominal Meterai Percetakan yang dibubuhkan pada Dokumen, sebesar jumlah lembar cek atau bilyet giro yang dibubuhi Meterai Percetakan (kolom 7) dikalikan dengan tarif Bea Meterai yang tertera pada Meterai Percetakan (kolom 8). |

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

Nomor : ..... (1) ....., .....20....(2)
Lampiran : ..... (3)
Hal : Permohonan Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala KPP ..... (4)
..... (5)

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengenai pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Dalam Bentuk Lain yang ditetapkan oleh Menteri dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, dengan ini:

nama : .....; (6)
NPWP : .....; (7)
alamat : ....., (8)

mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain berdasarkan Surat Izin Pembuatan Meterai Teraan/Meterai Komputerisasi*) Nomor ..... (9) tanggal ..... (10) karena**):

☐ mesin teraan meterai digital rusak;

☐ tidak membuat Meterai Teraan;

☐ tidak membuat Meterai Komputerisasi.

Demikian permohonan kami sampaikan.

Pemohon,

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN
PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nomor surat. |
| Angka (2) | : | diisi dengan tempat dan tanggal surat. |
| Angka (3) | : | diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat. |
| Angka (4) | : | diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| Angka (5) | : | diisi dengan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| Angka (6) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (7) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (8) | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (9) | : | diisi dengan nomor surat izin pembuatan Meterai Teraan atau surat izin pembuatan Meterai Komputerisasi yang dimintakan pencabutan. |
| Angka (10) | : | diisi dengan tanggal surat izin pembuatan Meterai Teraan atau surat izin pembuatan Meterai Komputerisasi yang dimintakan pencabutan. |
| Angka (11) | : | diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak, serta stempel untuk Wajib Pajak badan. |

Keterangan *) :

*) coret yang tidak sesuai.

**) beri tanda silang (X) pada salah satu kotak yang sesuai.

J. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT METERAI TERAAN ATAU METERAI KOMPUTERISASI

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMBUAT METERAI TERAAN/METERAI KOMPUTERISASI*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Alamat : ..... (3)

Bertindak selaku Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak*):
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Alamat : ..... (6)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Teraan/Meterai Komputerisasi*) dan tidak akan membuat Meterai Teraan/Meterai Komputerisasi*) di kemudian hari.

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain.

....., .....20.... (7)
Pembuat Pernyataan,

METERAI

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT METERAI TERAAN
ATAU METERAI KOMPUTERISASI

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Angka (2) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Angka (3) | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Angka (4) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (5) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (6) | : | diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (7) | : | diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat. |
| Angka (8) | : | diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. |
| Keterangan *) | : | coret yang tidak sesuai. |

K. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
..... (1)

---

SURAT PENCABUTAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN
Nomor: ..... (2)
Tanggal: ..... (3)

Berdasarkan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain dengan nomor Bukti Penerimaan .....(4) tanggal .....(5), dengan ini Surat Izin Pembuatan Meterai Teraan/Meterai Komputerisasi*) Nomor .....(6) atas:

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)

dinyatakan dicabut terhitung sejak tanggal ..... (10).

Atas Deposit yang masih tersisa sebesar .....(11) dapat dilakukan pemindahbukuan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pencabutan izin ini dimaksudkan untuk menghilangkan hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pembubuhan Meterai Teraan/Meterai Komputerisasi*). Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP ..... (12)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama dan alamat unit organisasi yang menerbitkan surat pencabutan izin. |
| Angka (2) | : | diisi dengan nomor surat pencabutan izin. |
| Angka (3) | : | diisi dengan tanggal surat pencabutan izin. |
| Angka (4) | : | diisi dengan nomor Bukti Penerimaan surat permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (5) | : | diisi dengan tanggal Bukti Penerimaan surat permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. |
| Angka (6) | : | diisi dengan nomor surat izin pembuatan Meterai Teraan atau surat izin pembuatan Meterai Komputerisasi yang dicabut. |
| Angka (7) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang izinnya dicabut. |
| Angka (8) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang izinnya dicabut. |
| Angka (9) | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak yang izinnya dicabut. |
| Angka (10) | : | diisi dengan tanggal surat pencabutan izin mulai berlaku. |
| Angka (11) | : | diisi dengan nilai Deposit Meterai Teraan atau Meterai Komputerisasi yang masih tersisa pada saat dilakukan pencabutan izin. |
| Angka (12) | : | diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| Angka (13) | : | diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| Keterangan *) | : | coret salah satu yang tidak sesuai. |

L. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN SECARA JABATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

---

SURAT PENCABUTAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN
SECARA JABATAN
Nomor: ..... (2)
Tanggal: ..... (3)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Penelitian*) Nomor .....(4) tanggal .....(5), dengan ini Surat Izin Pembuatan Meterai Teraan/Meterai Komputerisasi/Meterai Percetakan*) Nomor .....(6) atas:

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)

dinyatakan dicabut terhitung sejak tanggal .....(10).

Pencabutan izin ini dimaksudkan untuk menghilangkan hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pembubuhan Meterai Teraan/Meterai Komputerisasi/Meterai Percetakan*). Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP ..... (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN
SECARA JABATAN

| | | |
|---|---|---|
| Angka (1) | : | diisi dengan nama dan alamat unit organisasi yang menerbitkan surat pencabutan izin. |
| Angka (2) | : | diisi dengan nomor surat pencabutan izin. |
| Angka (3) | : | diisi dengan tanggal surat pencabutan izin. |
| Angka (4) | : | diisi dengan nomor laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil penelitian yang menjadi dasar pencabutan izin. |
| Angka (5) | : | diisi dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil penelitian yang menjadi dasar pencabutan izin. |
| Angka (6) | : | diisi dengan nomor surat izin pembuatan Meterai Teraan, surat izin pembuatan Meterai Komputerisasi, atau surat izin pembuatan Meterai Percetakan yang dicabut. |
| Angka (7) | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang izinnya dicabut. |
| Angka (8) | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang izinnya dicabut. |
| Angka (9) | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak yang izinnya dicabut, |
| Angka (10) | : | diisi dengan tanggal surat pencabutan izin mulai berlaku, |
| Angka (11) | : | diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, |
| Angka (12) | : | diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| Keterangan *) | : | coret salah satu yang tidak sesuai. |

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001